**BAB II**

**DESKRIPSI UMUM UNI AFRIKA (UA)**

1. **Latar Belakang Terbentuknya Uni Afrika**
2. Kebutuhan dan Kepentingan Negara-negara Afrika Untuk Membentuk Kerjasama

Afrika merupakan kawasan yang cukup luas dan diperkaya oleh sumber daya alam yang begitu melimpah. Akan tetapi, Afrika masih dikategorikan sebagai negara yang memiliki kemiskinan yang cukup tinggi. Ini dapat dilihat dari bagian sub-sahara Afrika dimana 37 dari 48 negara merupakan negara dengan tingkat pendapatan yang rendah. Di Afrika sendiri bentuk dari regionalisasinya cenderung mikro-regionalisme, dimana kerjasama yang terjadi cenderung dilakukan oleh antarnegara di benua Afrika. Kebangkitan regionalisme Afrika ini dimulai pada awal abad 20. Pada saat perang dunia kedua sedang berlangsung, permasalahan-permasalahan yang diangkat menjadi Afrika-sentris dan fokusnya tentang adanya pencelaan pada segala bentuk kolonialisme dan adanya dominasi orang-orang kulit putih. Selain itu, regionalisme di Afrika baru bisa dikembangkan juga karena banyaknya negara-negara di Afrika yang ,mulai memerdekakan dirinya dari kolonialisme. Adanya konflik yang diwarisi sejak era kolonialisme kemudian meninggalkan serangkaian persoalan terutama terkait dengan perbatasan dan area kedaulatan. Ditambah lagi dengan kemiskinan yang luar biasa yang mendorong banyak sekali aksi pelanggaran Hak Asasi Manusia dan berbagai krisis seperti perang saudara. Masalah kaburnya batas-batas negara yang jelas selain memicu perang saudara juga menimbulkan berbagai tindakan kriminal internasional yang teroganisir seperti jaringan perdagangan obat-obatan ilegal, pencucian uang, dan terorisme. Khusus untuk permasalahan terorisme ini, Afrika merupakan sasaran empuk teroris karena selain kaburnya batas-batas negara, juga didukung oleh supremasi hukum yang lemah.

Kemerdekaan yang diraih oleh negara-negara Afrika tidak serta merta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dengan sendirinya. Permasalahan-permasalahan yang dialami oleh banyak negara Afrika ini, tidak lantas bisa begitu saja diselesaikan dengan cara internal suatu negara tanpa melibatkan interaksi dengan negara-negara lain di Afrika. Tentu saja hal ini dikarenakan sifat permasalahan yang telah melintasi batas-batas negara. Kerjasama antar negara di Afrika dirasa sangat diperlukan dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di Afrika. Selain itu, regionalisme di Afrika merupakan bagian dari strategi bangsa Afrika untuk keluar dari ketertinggalan pembangunan ekonomi, politik, dan sosial mereka yang selama ini termarginalkan dari kemajuan global. Berbagai harapan muncul agar Afrika menjadi benua yang maju dan makmur yang dapat beriringan dan berakselerasi dengan sejumlah kemajuan yang telah dicapai kawasan lain, terlebih Eropa dengan model Uni Eropa-nya yang merupakan kawasan terdekat baik dari segi geografis maupun historis masa penjajahan kala itu. Tak dapat dimungkiri bahwa regionalisme di Afrika juga terkait dengan bagaimana bangsa Afrika berusaha lepas dari eksploitasi kolonialis dan imperialis Eropa yang pada akhirnya memunculkan perasaan senasib sebagai bangsa terjajah dan termarginalkan. Hal itu telah menimbulkan kesadaran di antara negara-negara Afrika untuk bersatu menciptakan sebuah kawasan yang maju, damai, bersatu, dan penuh dengan kerja sama.[[1]](#footnote-1)

Munculnya gerakan regionalisme di Afrika ini tidak lepas dari peran pergerakan organisasi perlawanan rakyat Afrika atau Africa Front Line States (FLS) dan Pan-Afrikanisme. FLS sendiri ada untuk melawan adanya dominasi kulit putih dikawasan Afrika. Dominasi ini juga merupakan akibat dari adanya kolonialisme di Afrika. Sedangkan Pan-Afrikanisme merupakan sebuah pergerakan yang dibentuk di Amerika Serikat dan *West Indies* pada abad ke-20.[[2]](#footnote-2) Pan-Afrikanisme memiliki gagasan yang menginginkan sebuah entitas besar dalam rangka menyatukan bangsa Afrika agar mereka dapat bersaing dengan kemajuan yang telah dicapai oleh kawasan lainnya. Bersatunya seluruh negara Afrika menjadi landasan utama untuk meredam sejumlah konflik dan perselisihan yang terus menerus terjadi serta menciptakan sebuah kawasan stabil yang mendukung strategi dan rencana pembangunan yang lebih maju.[[3]](#footnote-3)

Negara telah mengusahakan berbagai macam cara untuk mencegah atau pun mengatasai tantangan yang bermunculan. Salah satunya adalah melalui kerjasama dengan negara lain yang tergabung dalam organisasi regional. Organisasi regional merupakan organisasi yang anggotanya terkumpul dari satu wilayah tertentu dan dipercaya sebagai kunci untuk mengurangi risiko bencana dalam berbagai bidang di benua.[[4]](#footnote-4) Organisasi regional juga dapat berperan aktif dalam memelihara perdamaian dunia dan mereduksi tantangan permasalahan yang menyerang negara (Bab VIII Piagam PBB, *Regional Arrangements*).[[5]](#footnote-5) Selain itu, organisasi regional juga dipercaya lebih efektif dalam mengatasi masalah regional dibandingkan dengan aktor internasional lainnya karena beberapa negara mungkin menolak bantuan dari negara luar dan organisasi internasional untuk melindungi kedaulatan negara dan untuk melindungi diri terhadap aktor luar yang berusaha untuk mendapatkan pengaruh politik atas urusan internal negara mereka.[[6]](#footnote-6)

Penafsiran atas kebutuhan dan kepentingan negara-negara Afrika untuk bersatu tertuang pada keputusan untuk membentuk sebuah badan organisasi regional bernama *Organization of Africa Unity* (OAU) atau Organisasi Persatuan Afrika.

1. OAU sebagai latar belakang terbentuknya Uni Arika

OAU (*Organization of Africa Unity*) atau Organisasi Persatuan Afrika dibentuk pada 25 Mei 1963 di Addis Ababa, Ethiopia, yang digagas oleh Gamal Abdul Naser dari Mesir, Kwame Nkrumah (1909-1972) dari Ghana, dan Ahmad Sekouture dari Guinea. Keanggotaan OAU akhirnya mencakup seluruh lima puluh tiga negara Afrika, dengan pengecualian dari Maroko, yang mengundurkan diri pada tahun 1984 untuk memprotes pengakuan Republik Demokratik Arab Sahara, atau Sahara Barat. Proses dekolonisasi di Afrika yang dimulai pada 1950-an menyaksikan kelahiran banyak negara baru. Terinspirasi sebagian oleh filsafat persatuan Afrika, negara-negara Afrika dicari melalui politik kolektif sarana melestarikan dan mengkonsolidasikan kemerdekaan mereka dan mengejar cita-cita persatuan Afrika. Namun, dua kubu rival muncul dengan pandangan yang bertentangan tentang bagaimana tujuan-tujuan ini dapat dicapai dengan baik. *Casablanca Group*, yang dipimpin oleh Presiden Kwame Nkrumah, yang didukung panggilan radikal untuk integrasi politik dan pembentukan badan supranasional. *The Monrovia Group,* sebuah moderat, yang dipimpin oleh Kaisar Haile Selassie (1892-1975) dari Ethiopia, menganjurkan sebuah asosiasi dari negara-negara berdaulat yang memungkinkan untuk kerja sama politik di tingkat antar pemerintah. Pandangan terakhir menang. Oleh karena itu, OAU didasarkan pada "kesetaraan kedaulatan semua negara anggota," seperti yang dinyatakan dalam Piagam.[[7]](#footnote-7) Sesuai dengan Pasal II Piagam OAU, tujuan OAU adalah sebagai berikut:

1. Memajukan persatuan dan solidaritas negara-negara Afrika;
2. Mengoordinasi dan meningkatkan kerjasama dan usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik bagi bangsa-bangsa Afrika;
3. Membela kedaulatan, keutuhan wilayah, dan kemerdekaan Afrika;
4. Menghapuskan segala bentuk kolonialisme dari Afrika;
5. Memajukan kerjasama internasional.

OAU merupakan *continental regional intergovernmental organization* yang bertindak dengan menggunakan piagam PBB sebagai landasannya. OAU merupakan organisasi kontinental yang dapat di sejajarkan dengan OAS (*Organization of American State*), yaitu suatu asosiasi regional yang dibentuk pada tahun 1948.

OAU sendiri terdiri atas perwakilan kolektif negara-negara Afrika dan kepentingan mereka. Para anggota OAU sering menugaskan Sekretariat Umum atau ketua OAU untuk mengambil langkah-langah yang diperlukan, misalnya untuk berbicara dalam sidang umum PBB atau organisasi-organisasi yang bergerak di bawah PBB, mengenai beberapa masalah di wilayah mereka, khususnya masalah dekolonisasi dan rasialisme yang dalam prakteknya masih saja sering terjadi di sejumlah negara di Afrika

Dalam hal tersebut, para anggota OAU mendelegasikan wewenang politik luar negerinya kepada OAU. Namun, OAU tetap bukan merupakan suatu badan supranasional tetapi lebih berupa suatu badan konsultasi internasional. Karena dalam piagam OAU tidak pernah ada ketentuan yang menyebutkan bahwa resolusi yang di tetapkan bersifat mengikat, dan juga tidak di terapkannya sanksi bagi sejumlah negara yang melanggar atau tidak menerapkan resolusi tersebut. Keputusan-keputusan yang diambil oleh OAU sering berdasarkan pada sistem voting, namun seringkali hasil dari keputusan itu diabaikan oleh sejumlah anggotanya.

Tiga puluh tahun pertama sejak OAU resmi didirikan, berbagai tantangan di bidang keamanan dan perdamaian banyak muncul. Khususnya masalah perjuangan kemerdekaan, konflik rasial, perang sipil, dan konflik antar negara, contohnya seperti konflik Darfur di Sudan, Somalia dan Ethiopia, kasus rasialis di Zimbabwe, dan sebagainya. Dalam menyelesaikan konflik-konflik di wilayahnya, OAU tidak sendirian. Seringkali ia dibantu atau bekerjasama dengan PBB dan badan-badan lain yang bergerak di bawahnya. PBB sendiri juga telah mengakui OAU dan memberinya status sebagai *permanent observer* di PBB dan memberikan kesempatan yang luas kepada OAU untuk bekerjasama dengan dua kantor PBB di New York dan Geneva.

Keuntungan yang didapat oleh negara-negara Afrika setelah mereka bergabung dengan OAU ialah dalam hal diplomatik. Terdapat lima puluh tiga negara anggota di OAU dan semuanya telah menjadi anggota PBB. Dengan kata lain, sepertiga dari negara anggota di PBB berasal dari delegasi Afrika, dan jika negara-negara ini bersama-sama meminta untuk dilakukannya suatu kebijakan, maka suara mereka akan lebih di dengarkan ketimbang bila hanya segelintir dari mereka yang bertindak.

Seperti cita-cita awal didirikannya OAU, yaitu untuk memperbaiki taraf kehidupan negara anggotanya, Pada Mei 1973, OAU mengeluarkan resolusi bagi seluruh negara Afrika untuk mencapai kemerdekaan ekonominya dan mengidentifikasikan prinsip-prinsip tindakan bersama maupun individu. Program ini bernama Diplomasi Ekonomi. Dan organisasinya bernama *African Economic Community* (AEC).

Kerjasama ekonomi ini berjalan dengan baik selama sebelas tahun. Pada tahun 1991, langkah untuk lebih menyatukan Afrika di implementasikan dengan membentuk Pasar Bersama Afrika dengan memanfaatkan Masyarakat Ekonomi Regional sebagai materi pembangunnya. Jadi OAU tidak hanya begerak berdasarkan piagam OAU tahun 1963 saja, tetapi juga pada pakta AEC tahun 1994.

Tahun 1999, dalam KTT OAU di Algiers, gagasan untuk mengintegrasikan proses politik (melalui OAU) dan ekonomi (melalui AEC) menjadi bahasan utama, sehingga diadakan kembali KTT Luar Biasa di Sirte, Libya. Hasil dari KTT tersebut adalah pendeklarasian beroperasinya *African Union* (AU) atau Uni Afrika yang merupakan hasil dari pengintegrasian antara OAU dan AEC.

Secara total, empat KTT diadakan menjelang peluncuran resmi Uni Afrika,:

* 1. Sirte Summit (1999), yang mengadopsi Deklarasi Sirte menyerukan pembentukan Uni Afrika
  2. Lome Summit (2000), yang mengadopsi Konstitutif Uni Afrika
  3. Lusaka Summit (2001), yang menarik peta jalan untuk pelaksanaan Uni Afrika
  4. Durban Summit (2002), yang meluncurkan Uni Afrika dan mengadakan Majelis pertama dari Kepala Negara dan Pemerintahan.[[8]](#footnote-8)

Dari segi tujuan Uni Afrika tidak merubah draft awal tujuan dari OAU, hanya terdapat beberapa tambahan, seperti; mendorong pembangunan di Afrika dengan memajukan riset di segala bidang, dan menjalin kerjasama dengan mitra internasional untuk memberantas penyakit-penyakit yang dapat di cegah endeminya di wilayah Afrika.

Dengan di setujuinya *Constitutive Act of the African Union*, maka terdapat perombakan di dalam tubuh Uni Afrika, seperti di bentuknya *The Assembly of the Head of State and Government, The Executive Council of Ministers and the Permanent Representatives* Comittee, dan yang paling penting terdapatnya *The Peace and Security Council* (Dewan Perdamaian dan Keamanan).[[9]](#footnote-9)

1. Uni Afrika

Uni Afrika (*African Union*) merupakan sebuah organisasi internasional antar pemerintah di Afrika yang secara resmi berdiri pada tanggal 9 Juli 2002 di Durban, Afrika Selatan. Uni Afrika merupakan penerus dari organisasi sebelumnya yaitu OAU (*Organization of African Unity*) tanpa merubah prinsip-prinsip dasar dari OAU itu sendiri. Organisasi ini berambisi untuk menyatukan seluruh negara kawasan Afrika serta berusaha untuk berperan lebih aktif dalam perekonomian global, disamping juga berusaha menyelesaikan berbagai masalah sosial, ekonomi, dan politik negara-negara anggotanya. Selain itu Uni Afrika bertujuan menyebarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pembangunan di penjuru Afrika, mempercepat integrasi politik dan sosial-ekonomi, memajukan dan mempertahankan posisi Afrika secara bersama dalam masalah-masalah kepentingan terhadap rakyat Afrika, serta perdamaian dan keamanan di Afrika. Sampai dengan tahun 2011, Uni Afrika telah memiliki 54 anggota. Berikut adalah daftar anggota Uni Afrika:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO.** | **NAMA NEGARA** | **TANGGAL BERGABUNG** |
|  | Aljazair | 25 Mei 1963 |
|  | Angola | 11 Februari 1975 |
|  | Benin | 25 Mei 1963 |
|  | Botswana | 31 Oktober 1966 |
|  | Burkina Faso | 25 Mei 1963 |
|  | Burundi | 25 Mei 1963 |
|  | Cabo Verde | 18 Juli 1975 |
|  | Kamerun | 25 Mei 1963 |
|  | Republik Afrika Tengah | 25 Mei 1963 |
|  | Chad | 25 Mei 1963 |
|  | Komoro | 18 Juli 1975 |
|  | Kongo | 25 Mei 1963 |
|  | Pantai Gading | 25 Mei 1963 |
|  | DR Kongo | 25 Mei 1963 |
|  | Djibouti | 27 Juni 1977 |
|  | Mesir | 25 Mei 1963 |
|  | Equatorial Guinea | 12 Oktober 1968 |
|  | Eritrea | 24 Mei 1993 |
|  | Etiopia | 25 Mei 1963 |
|  | Gabon | 25 Mei 1963 |
|  | Gambia | 9 Maret 1965 |
|  | Ghana | 25 Mei 1963 |
|  | Guinea | 25 Mei 1963 |
|  | Kenya | 13 Desember 1963 |
|  | Guinea-Bissau | 19 November 1973 |
|  | Lesotho | 31 Oktober 1966 |
|  | Liberia | 25 Mei 1963 |
|  | Libya | 25 Mei 1963 |
|  | Madagaskar | 25 Mei 1963 |
|  | Malawi | 13 Juli 1964 |
|  | Mali | 25 Mei 1963 |
|  | Mauritania | 25 Mei 1963 |
|  | Mauritius | Agustus 1968 |
|  | Mozambik | 18 Juli 1975 |
|  | Namibia | Juni 1990 |
|  | Niger | 25 Mei 1963 |
|  | Nigeria | 25 Mei 1963 |
|  | Rwanda | 25 Mei 1963 |
|  | Republik Sahrawi | 22 Februari 1982 |
|  | Sao Tome dan Principe | 18 Juli 1975 |
|  | Senegal | 25 Mei 1963 |
|  | Seychelles | 29 Juni 1976 |
|  | Sierra Leone | 25 Mei 1963 |
|  | Somalia | 25 Mei 1963 |
|  | Afrika Selatan | 6 Juni 1994 |
|  | Sudan Selatan | 27 Juli 2011 |
|  | Sudan | 25 Mei 1963 |
|  | Swaziland | 24 September 1968 |
|  | Togo | 25 Mei 1963 |
|  | Tunisia | 25 Mei 1963 |
|  | Uganda | 25 Mei 1963 |
|  | UR Tanzania | 18 Juni 1980 |
|  | Zambia | 16 Desember 1964 |
|  | Zimbabwe | 25 Mei 1963 |

Tabel 2.1 Daftar anggota Uni Afrika[[10]](#footnote-10)

Ketua pertama dari Uni Afrika adalah Thabo Mbeki presiden Afrika Selatan. Kantor pusat kegiatan Uni Afrika berada di kota Addis Ababa di Ethiopia. Berdasarkan Pasal 11 dari Protokol Konstitutif AU, bahasa resmi Uni Afrika dan semua lembaga-lembaganya adalah bahasa Arab, Inggris, Perancis, Portugis, Spanyol, dan bahasa Kiswahili Afrika lainnya. Bahasa kerja AU adalah bahasa Arab, Inggris, Perancis dan Portugis. Uni Afrika memiliki sebuah lambang resmi Organisasi yang gambarnya seperti berikut:



Gambar 2.2 logo organisasi Uni Afrika

Lambang Uni Afrika terdiri dari lima elemen:

1. Dua daun Palm berwarna hijau di kedua sisi luar lingkaran merupakan simbol untuk perdamaian.
2. Lingkaran emas melambangkan Afrika yang kaya dan masa depan yang cerah.
3. Lingkaran hijau merupakan simbol harapan dan aspirasi Afrika .
4. Peta dataran Afrika tanpa batas dalam lingkaran bagian dalam menandakan persatuan Afrika.
5. Cincin merah kecil yang saling terhubung di dasar lambing merupakan symbol solidaritas Afrika dan darah yang dicurahkan untuk pembebasan Afrika.[[11]](#footnote-11)
6. **Tujuan dan Peran Uni Afrika**
7. Visi dan Misi Uni Afrika

Sebagai sebuah organisasi internasional, Uni Afrika dipastikan memiliki tujuan anggota bersama yang terwujud dalam sebuah Visi dan Misi organisasi sebagai berikut:

Visi Uni Afrika:

Terpadu, makmur dan damai Afrika, didorong oleh rakyatnya sendiri dan mewakili kekuatan dinamis dalam arena global.

Misi Uni Afrika:

Sebuah lembaga yang efisien dan mendorong nilai tambah integrasi dan proses pengembangan Afrika dalam kerjasama erat dengan negara-negara anggota Uni Afrika, Masyarakat Ekonomi Daerah dan warga Afrika.

Dalam menjalankan misinya, Uni Afrika memiliki nilai-nilai yang memandu dan mengatur fungsi dan operasi Komisi:

1. Menghargai keberagaman dan tim kerja;
2. Prioritas terhadap Afrika;
3. Transparansi dan akuntabilitas;
4. Integritas dan ketidakberpihakan;
5. Efisiensi dan profesionalisme; dan
6. Berbagi pengetahuan informasi.

Para pemimipin Afrika merumuskan semua tujuan yang termuat dalam piagam OPA ditambah dengan beberapa tujuan lainnya guna memberikan kemampuan yang lebih besar bagi organisasi untuka dapat berperan aktif dalam mencapai tujuan-tujuan bangsa Afrika. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Piagam Uni Afrika:

* Untuk mencapai persatuan yang lebih besar dan solidaritas antara negara-negara Afrika dan bangsa Afrika;
* Untuk mempertahankan kedaulatan, integritas teritorial dan kemerdekaan negara-negara anggota;
* Untuk mempercepat integrasi politik dan sosial-ekonomi dari benua;
* Untuk mempromosikan dan membela Afrika posisi umum pada isu-isu yang menarik bagi benua dan rakyatnya;
* Untuk mendorong kerjasama internasional, dengan mempertimbangkan dari Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
* Untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di benua;
* Untuk mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi dan institusi, partisipasi rakyat dan pemerintahan yang baik;
* Untuk mempromosikan dan melindungi manusia dan hak-hak sesuai dengan Piagam Afrika tentang Manusia dan Masyarakat bangsa Hak dan instrumen HAM lainnya yang relevan;
* Untuk membangun kondisi yang diperlukan yang memungkinkan benua untuk memainkan peran yang sah dalam ekonomi global dan dalam negosiasi internasional;
* Untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan di tingkat ekonomi, sosial dan budaya serta integrasi perekonomian Afrika;
* Untuk mempromosikan kerjasama di semua bidang kegiatan manusia untuk meningkatkan standar hidup masyarakat Afrika;
* Melakukan koordinasi dan harmonisasi kebijakan antara Masyarakat Regional Ekonomi yang ada dan masa depan untuk bertahap mencapai tujuan organisasi;
* Untuk memajukan pengembangan benua dengan mempromosikan penelitian di segala bidang, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
* Bekerja sama dengan mitra internasional yang relevan dalam pemberantasan penyakit yang dapat dicegah dan promosi kesehatan yang baik di kawasan.[[12]](#footnote-12)

Berbeda dengan OAU yang memiliki prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggotanya, Uni Afrika justru sebaliknya. Organisasi baru ini berhak mencampuri urusan internal negara anggotanya jika terjadi peristiwa yang dapat mengancam stabilitas (perdamaian) serta keamanan kawasan secara keseluruhan. Namun intervensi tersebut tetap diatur melaui prosedur dan mekanisme yang ada dalam organisasi. Salah satu bentuk ancaman stabilitas keamanan kawasan adalah munculnya konflik-konflik internal yang bernuansa etnis maupun perebutan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya perang sipil di sebuah negara.

Prinsip-prinsip Uni Afrika secara lengkap termuat dalam pasal 4 Piagam Uni Afrika sebagai berikut:

* Persamaan Kedaulatan dan saling ketergantungan semua Negara anggota.
* Penghormatan atas batas-batas kehidupan dalam mencapai kemerdekaan.
* Partisipasi masyarakat Afrika dalam kegiatan-kegiatan organisasi.
* Pembentukan kebijakan pertahanan bersama bagi kawasan Afrika.
* Penyelesaian sengketa secara damai diantara Negara anggota.
* Larangan penggunaan kekuatan bersenjata atau ancaman bersenjata terhadap negara anggota.
* Organisasi berhak untuk mengintervensi negara anggota dengan persetujuan Majelis jika terjadi situasi-situasi tertentu yang memungkinkan organisasi untuk melakukan intervensi seperti: kejahatan perang, genosida dan kejahatan terhadap perang.
* Perdamaian di antara negara anggota dan hak untuk hidup dalam keadaan aman dan damai.
* Negara anggota berhak untuk meminta organisasi melakukan intervensi dalam upaya memulihkan keamanan dan perdamaian.
* Memajukan kemandirian dalam kerangka organisasi.
* Persamaan gender
* Penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, HAM, hukum dan pemerintah yang baik.
* Keadilan sosial untuk menjamin pelaksanaan pengembangan ekonomi.
* Penghormatan atas kehidupan manusia, hukuman dan penolakan terhadap kekebalan politik, pembunuhan, terorisme dan aktivitas subversive.
* Mengutuk dan menolak perubahan pemerintahan yang tidak konstitusional.
* Tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota.[[13]](#footnote-13)

1. Kedudukan dan Struktur Keanggotaan Uni Afrika

Terdapat beberapa Organ utama dalam Uni Afrika. Organ-organ tersebut terdiri dari:

1. Majelis (*The Assembly the Union*)

Terdiri dari Kepala Negara dan Pemerintah atau yang mewakili mereka yang terakreditasi. Majelis Kepala Negara dan Pemerintahan adalah organ tertinggi Uni Afrika. Majelis memilih seorang ketua Unia Afrika, yang memegang jabatan selama satu tahun.

1. Dewan Eksekutif (*The Executive Council*)

Dewan Eksekutif terdiri dari Menteri atau Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Negara-Negara Anggota. Dewan Eksekutif bertanggung jawab kepada Majelis.

1. Komisi (*The Commission*)

Terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, delapan Komisaris dan anggota staf; Setiap Komisaris bertanggung jawab atas portofolio individu yang mengelola tugas harian dan melaksanakan kebijakan Uni Afrika. Komisi melaporkan kepada Dewan Eksekutif.

1. Komite Perwakilan Tetap (*The Parliament Representatives Committee*)

Terdiri dari Wakil Tetap negara-negara anggota terakreditasi ke Uni Afrika. Komite Perwakilan Tetap dibebankan dengan tanggung jawab mempersiapkan karya Dewan Eksekutif.

1. *The Peace and Security Council* (PSC)

*The Peace and Security Council* (PSC) atau Dewan Perdamaian dan Keamanan yang didirikan pada tahun 2004. Badan ini dapat campur tangan dalam konflik untuk melindungi keamanan di kawasan Afrika. Memiliki lima belas negara anggota, dipilih untuk dua atau tiga tahun, dengan hak suara yang sama. PSC juga mengawasi pembentukan pasukan keamanan Afrika, Angkatan siaga Uni Afrika.

1. Parlemen Pan-Afrika (*The Pan-African Parliament*)

Sebuah Parlemen Pan Afrika, dan organ untuk menjamin partisipasi penuh dari masyarakat Afrika di pemerintahan, pembangunan dan integrasi ekonomi kawasan. Protokol yang berkaitan dengan komposisi, kekuasaan, fungsi dan organisasi dari Parlemen Pan Afrika telah ditandatangani oleh negara-negara anggota dan sedang dalam proses ratifikasi.

1. *The Economic, Social and Cultural Council* ECOSOCC

*The Economic, Social and Cultural Council* ECOSOCC atau Dewan Ekonomi, Sosial dan Budaya Dewan, organ penasihat yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial dan profesional yang berbeda dari negara-negara anggota Uni. Statuta menentukan fungsi, wewenang, komposisi dan organisasi Ekonomi, Sosial dan Budaya Dewan telah disusun dan akan diserahkan ke Maputo Summit.

1. Mahkamah Kehakiman (*The Court of Justice*)

Pada tahun 2004, Uni Afrika setuju bahwa Mahkamah Manusia dan Hak Masyarakat Afrika akan bergabung dengan Mahkamah Kehakiman.

1. Tugas dan Kewajiban Anggota (Dewan Keamanan Uni Afrika)

*Peace and Security Council* (PSC) atau Dewan Keamanan Uni Afrika adalah organ Uni Afrika yang berdiri untuk pencegahan, manajemen dan resolusi konflik. Ini adalah elemen kunci dari *African Peace and Security Architecture* (APSA), yang merupakan istilah umum untuk mekanisme utama Uni Afrika untuk mempromosikan perdamaian, keamanan dan stabilitas di Afrika.

PSC didirikan untuk menjadi keamanan kolektif dan pengaturan 'peringatan dini' dengan kemampuan untuk memfasilitasi respon yang tepat waktu dan efisien untuk situasi konflik dan krisis. Fungsi utama PSC adalah untuk melakukan peringatan dini dan diplomasi preventif, memfasilitasi keputusan perdamaian, membangun operasi dukungan perdamaian dan dalam keadaan tertentu, merekomendasikan intervensi di negara-negara anggota untuk mempromosikan perdamaian, keamanan dan stabilitas. PSC juga bekerja untuk mendukung perdamaian dan rekonstruksi pasca-konflik serta aksi kemanusiaan dan penanggulangan bencana.

Kewenangan PCS berasal dari artikel 20 dari Konstitutif (yang dimasukkan oleh pasal 9 Protokol tentang Perubahan atas Undang-Undang konstitutif 2003) bersama-sama dengan pasal 2 tahun 2002 Protokol yang berkaitan dengan Pembentukan Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika.

Berdasarkan pasal 7 dari Protokol, kekuatan kunci PSC meliputi untuk:

* Mengantisipasi dan mencegah perselisihan dan konflik, serta kebijakan, yang dapat menyebabkan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan
* Melakukan perdamaian pembuatan, perdamaian dan misi dukungan perdamaian
* Merekomendasikan intervensi dalam suatu Negara Anggota dalam hal keadaan serius, yaitu kejahatan perang, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan
* sanksi institusi
* Menerapkan kebijakan pertahanan umum Uni Afrika
* Memastikan pelaksanaan konvensi kunci dan instrumen untuk memerangi terorisme internasional
* Mempromosikan koordinasi antara mekanisme regional dan AU mengenai perdamaian, keamanan dan stabilitas di Afrika
* Tindak lanjut promosi praktek demokrasi, *good governance*, *rule of law*, perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, menghormati kesucian hidup manusia dan hukum kemanusiaan internasional
* Mempromosikan dan mendorong pelaksanaan konvensi dan perjanjian pada kontrol senjata dan perlucutan senjata
* Memeriksa dan mengambil tindakan dalam situasi di mana kemerdekaan nasional dan kedaulatan dari suatu Negara Anggota terancam oleh tindakan agresi, termasuk oleh tentara bayaran
* Mendukung dan memfasilitasi aksi kemanusiaan dalam situasi konflik bersenjata atau bencana alam.

PSC adalah penerus OAU *Central Organ of the Mechanism for Conflict Prevention, Management and Resolution* (Organ Central Mekanisme Pencegahan Konflik, Manajemen dan Resolusi). Organ Central adalah tubuh operasional OAU yang diamanatkan untuk membuat keputusan mengenai hal-hal perdamaian dan keamanan. Terdiri dari sembilan dan kemudian 14 negara anggota. Seperti PSC, Organ dioperasikan pada KTT, menteri dan tingkat duta besar.

The PSC memiliki 15 anggota. Semua dipilih oleh Dewan Eksekutif Uni Afrika dan disahkan oleh Majelis pada persidangan berikutnya. Lima anggota yang dipilih untuk masa tiga tahun dan 10 untuk jangka dua tahun, biasanya untuk bekerja pada hari pertama bulan April menyusul dukungan dari Majelis. Anggota yang rehat memenuhi syarat untuk segera pemilihan kembali.

Anggotanya dipilih sesuai dengan prinsip representasi daerah yang adil dan rotasi nasional. Rotasi nasional disepakati dalam kelompok-kelompok regional. Perwakilan regional biasanya:

* + Afrika Tengah: tiga kursi
  + Afrika Timur: tiga kursi
  + Afrika Utara: dua kursi
  + Afrika Selatan: tiga kursi
  + Afrika Barat: empat kursi.

Pasal 5 Protokol PSC daftar kriteria untuk menjadi anggota meliputi: kontribusi terhadap promosi dan pemeliharaan perdamaian dan keamanan di Afrika; partisipasi dalam resolusi konflik, perdamaian keputusan dan perdamaian di tingkat regional dan benua; kemauan dan kemampuan untuk mengambil tanggung jawab atas inisiatif penyelesaian konflik regional dan benua; kontribusi kepada Dana Perdamaian dan / atau Dana Khusus; menghormati pemerintahan konstitusional, aturan hukum dan hak asasi manusia; dan berkomitmen kepada Uni Afrika untuk memenuhi kewajiban keuangan.

Sekretariat PSC, yang dibentuk berdasarkan pasal 10 dari Protokol PSC, menyediakan dukungan operasional langsung. Sekretariat duduk dalam Departemen Perdamaian dan Keamanan Komisi Uni Afrika.

PSC bertemu di sesi yang berkesinambungan. Semua anggota diwajibkan untuk hadir secara permanen di Markas Uni Afrika. Rapat dilaksanakan pada tiga tingkatan: Perwakilan tetap, Menteri atau Kepala Negara dan Pemerintahan. Pasal 8 Protokol PSC membutuhkan Wakil Tetap untuk melakukan pertemuan setidaknya dua kali sebulan, dan Menteri dan Kepala Negara dan Pemerintahan setidaknya sekali setahun. Pasal 8 menyatakan bahwa Ketua dipilih secara bergilir dalam lingkup anggotanya, dalam urutan abjad nama alfabet, selama satu bulan kalender. Pertemuan PSC meliputi sesi tertutup, pertemuan terbuka dan konsultasi informal.

Ketua PSC diberi mandat untuk menyusun program kerja sementara dan agenda. Ketua dapat membawa masalah penting PSC yang dapat mengancam perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan, dan dapat meminta briefing dari komite PSC dan organ Uni Afrika dan lembaga. Agenda ini didasarkan pada proposal yang diajukan oleh Ketua Komisi Uni Afrika dan oleh Negara Anggota. Dimasukkannya setiap item pada agenda sementara, mengharuskan tidak ada tentangan dari Negara Anggota.

Keputusan PSC dipandu oleh prinsip konsensus. Dimana konsensus tidak mungkin, keputusan mengenai hal-hal prosedural yang diambil oleh mayoritas yang sederhana; dan mengenai hal-hal substantif, dengan mayoritas dua pertiga (Protokol PSC, pasal 8). Seorang anggota yang pihak konflik atau situasi yang sedang dipertimbangkan oleh PSC mungkin tidak berpartisipasi dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan konflik atau situasi (Protokol PSC, pasal 8)

Delapan *AU-led Peace Support Operations* (PSOs) atau Penunjang Operasi Perdamaian telah dikerahkan sejak tahun 2003. Kerangka kebijakan *Afrika Standby Force* (ASF) tersedia untuk *Peace Support Operations Division* (PSOD) atau Divisi Penunjang Operasi Perdamaian, di bawah Departemen Komisi Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika, bertanggung jawab untuk pelaksanaan semua keputusan PSC tentang penyebaran PSO. PSC juga bertanggung jawab atas perencanaan, penyebaran, memelihara kelestarian dan likuidasi PSO.

Kebanyakan mandat operasi diperbaharui secara berkala dan dapat direvisi jika perlu. dan angka kekuatan militer, polisi dan personil sipil, bervariasi dari waktu ke waktu karena rotasi kontingen dan personil.

Pengaturan pendanaan operasi dukungan perdamaian Uni Afrika bervariasi antara misi satu dan lainnya, tetapi biasanya pendanaan terdiri dari Dana Perdamaian Uni Afrika, mitra internasional dan, dalam beberapa kasus, kontribusi dinilai dari anggaran penjaga perdamaian PBB. Beberapa *Troop Contributing Countries* (TCCS) atau kontribusi pasukan negara, menanggung biaya mereka sendiri.[[14]](#footnote-14)

1. **Misi Perdamaian Yang Dilakukan OAU/Uni Afrika**
2. Misi OAU di Chad

Pada tahun 1979, Chad, salah satu negara anggota OAU, mengalami konflik bernuansa etnis. Konflik tersebut bersumber dari konflik Utara-Selatan dalam upaya memperebutkan kekuasaan setelah jatuhnya pemerintahan Flix Malloum pada Februari 1979. Akar konflik itu sendiri sebenarnya telah terjadi sejak tahun 1960-an. Konflik di Chad adalah mikrokosmos dari ketidakstabilan luas di Afrika. sejak

kemerdekaannya pada tahun 1960, perdamaian, keamanan, dan stabilitas telah meninggalkan Chad sama seperti di sebagian besar Afrika. Sejak tahun 1960, 18 perang saudara telah terjadi di Afrika. Sebelas genosida dan politicides terjadi di Afrika antara 1960 dan akhir 1980-an, dibandingkan dengan 24 bagian dunia yang lain. Selama dekade 1980-an saja, diperkirakan bahwa konflik dan kekerasan telah menelan korban lebih dari 3 juta jiwa. Pada awal tahun 1990, 43 persen dari populasi global pengungsi Afrika, sebagian besar dari mereka melarikan diri dari kekerasan politik. Mediasi dan resolusi konflik memang harus menjadi keasyikan utama kepemimpinan benua.[[15]](#footnote-15)

Dalam rangka mengatasi konflik di Chad, OAU membentuk panitia ad hoc untuk Chad pada tahun 1977. Panitia ad hoc tersebut bertejuan mendamaikan pihak-pihak yang bertikai melalui jalur diplomasi. Komposisi paniti terdiri dari Algeria, Kamerun, Gabon, Mozambique, Nigeria dan Senegal yang ditunjuk oleh OAU pada pertemuan tingkat tinggi di Libreville, bulan Juli 1977. Pada pertemuan tahunan OAU selanjutnya di Khartoum, Sudan, tahun 1978, OAU mengubah keanggotaan panitia ad hoc menjadi hanya 4 negara saja, yaitu Kamerun, Niger, Nigeria dan Sudan.

Nigeria sebagai salah satu panitia ad hoc untuk Chad, berusaha menyelesaikan konflik di Chad dengan cara mengundang pihak-pihak yang bertikai untuk mengadakan pertemuan di Kano pada bulan Maret 1979. Salah satu poin kesepakatan yang dihasilkan pada pertemuan tersebut adalah Nigeria diijinkan untuk mengirimkan pasukan penjagaan perdamian ke N’djamena, ibukota Chad untuk memastikan pengawasan gencatan senjata.

OAU akhirnya memutuskan untuk mengganti Nigeria dengan mengirim pasukan Afrika yang terdiri dari Benin, Congo dan Guinea melalui keputusan pertemuan di OAU di Monrovia dan Lagos pada bulan Agustus 1979. Pada pertemuan di Lagos pihak-pihak yang bertikai di Chad sepakat untuk membentuk pemerintahan transisi yang diberi nama *Government d’Union Nationale Transtioire* (GUNT) dan menunjuk Sekretaris Jendral OAU untuk menggantikan Nigeria sebagai ketua komisi pengawas gencatan senjata untuk menjamin setiap pihak yang bertikai memegang teguh dan melaksanakan perjanjian damai.

Keengganan negara-negara anggota OAU untuk mendanai operasi di Chad membuat operasi tersebut berjalan tidak efektif. Benin dan Guinea, dua negara yang ditunjukan oleh OPA untuk mengirimkan pasukan ke Chad, mengaku tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai opersai tersebut. Sedangkan Kongo, hanya mampu menurunkan pasukan infanteri dengan bantuan Algeria.[[16]](#footnote-16)

1. Misi Uni Afrika di Burundi

Pada tahun 1993, Melchior Ndadaye, presiden Burundi pertama yang terpilih secara demokratis dan seorang pemimpin Front Pour la Democratie au Burundi (FORDEBU) dari suku Hutu dibunuh oleh seorang suku Tutsi, suku yang mendominasi tentara Burundi. Peristiwa tersebut melahirkan perang terbuka antara pemberontak Hutu dan militer Burundi. Lebih dari 300.000 orang Burundi terbunuh dalam pertikaian antar etnis tersebut dan kebanyakan korban adalah warga sipil yang tidak ada hubungannya dengan konflik.

Sejumlah pemimpin Afrika termasuk mantan presiden Tanzania, Julius Nyerere, mantan presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela dan mantan wakil presiden Afrika Selatan, Jacob Zuma berusaha keras untuk menyelesaikan konflik etnis di Burundi. Akhirnya pada tahun 2000, 17 partai politik Burundi beserta pemerintah dan Majelis Burundi (National Assembly) menandatangani perjanjian Arusha dalam rangka penyelesaian menyeluruh terhadap konflik internal Burundi. Namun perjanjian tersebut tidak ditandatangani oleh dua kelompok pemberontak utama Burundi, *The Conseil National Pour la Defense de la Democratic-Forces Pour la Defense da la Democratic* (CNDD-FDD) dan *Parti Pour la Liberation du Peuple Hutu-Forces Nationales de Liberation* (PALIPU HUTU-FNL).

Pada November 2003 kelompok pemberontak CNDD-FDD menandatangani kesepakatan damai dan bersedia bergabung dalam pemerintahan transisi Burundi. Namun kelompok pemebrontak FNL tidak ingin menandatangani kesepakatan damai dan bersedia bergabung dalam pemerintahan transisi Burundi. Namun kelompok pemberonrak FNL tidak ingin menandatangani kesepakatm tersebut dan terus meakukan penyerangan terhadap pemerintah transisi Burundi. Kondisi ini menggambarkan situasi keamanan Burundi dalam bahaya dan mendorong Uni Afrika untuk berperan dalam upaya penyelesaian konflik di Burundi.

Pada April 2003, Uni Afrika membentuk misi perdamaian di Burundi yang diberi nama *An African Union Mission in Burundi* (AMIB). AMIB diberi wewenang pada tahun 2003 oleh OAU Central Organ Mekanisme Pencegahan Konflik, Manajemen dan Resolusi, yang dioperasikan menunda penciptaan PSC. AMIB diberi mandat untuk mengawasi, mengamati, memantau dan memverifikasi pelaksanaan perjanjian gencatan senjata untuk mengkonsolidasikan proses perdamaian di Burundi. Antara tahun 2003 dan 2004, AMIB melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya oleh *Central Organ* termasuk mendukung kegiatan Komisi Gencatan Senjata Bersama *(Joint Ceasefire Commission*) dan komite teknis bertanggung jawab untuk menetapkan Angkatan Pertahanan baru Nasional (*National Defense Force*) dan Kepolisian. AMIB juga mendukung pengamanan perjalanan masyarakat dan pemberian bantuan kemanusiaan, dan memberikan bantuan teknis untuk perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi. Pasukan berseragam yang resmi dari AMIB adalah 3500 personil militer.

Dari Juni 2004, AMIB digantikan oleh misi PBB, yang terakhir Kantor PBB di Burundi (BNUB), yang didirikan pada tahun 2010. Mandat BNUB yang telah baru-baru ini diperpanjang sampai 31 Desember 2014 (resolusi DK PBB 2137 dari 13 Februari 2014).[[17]](#footnote-17)

1. Misi Uni Afrika di Darfur

Perang sipil yang pecah pada tahun 2003 menyebabkan kematian puluhan bahkan hingga ratusan ribu jiwa, serta hampir dua juta pengungsi rakyat Darfur. Dalam pertempuran antara Pemerintah Sudan dan milisi serta kelompok pemberontak bersenjata lainnya, kekejaman luas seperti pembunuhan dan pemerkosaan terhadap warga sipil telah banyak dilakukan.

PBB mengangkat alarm tentang krisis di Darfur pada tahun 2003, dan usaha menemukan resolusi konflik telah menjadi prioritas utama bagi Dewan Keamanan dan Sekretaris Jenderal PBB.

Di bawah naungan Uni Afrika (AU) dan dengan dukungan dari PBB dan mitra lainnya, Perjanjian Perdamaian Darfur (DPA) ditandatangani pada tanggal 5 Mei 2006. Penandatanganan proses perdamaian baru di bawah gabungan Uni Afrika-PBB sebagai mediator yang dilakukan oleh beberapa pihak berlangsung di Doha, Qatar, dari 2010 sampai Juni 2011, dan menghasilkan kerangka dokumen. Upaya diplomatik dan politik yang intensif untuk membawa pihak-pihak yang tidak menandatangani perjanjian Dokumen Doha untuk Perdamaian di Darfur dilanjutkan.

Setelah 16 November 2006 konsultasi Tingkat Tinggi di Addis Ababa, Ethiopia, *UN Department of Peacekeeping Operations* (DPKO) ditambah African *Union Mission in Sudan* (AMIS) siap untuk menyebarkan sendi operasi penjaga perdamaian Uni Afrika / PBB yang pertama kali di Darfur.

Diplomasi intensif oleh Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon dan beberapa aktor dalam masyarakat internasional membuat Sudan menerima pasukan ini pada bulan Juni 2007. Operasi campuran Uni Afrika / PBB di Darfur resmi didirikan oleh Dewan Keamanan pada tanggal 31 Juli 2007 melalui penerapan resolusi 1769 , disebut dengan singkatan UNAMID, di bawah Bab VII Piagam PBB. UNAMID secara resmi mengambil alih mandat dari AMIS pada tanggal 31 Desember 2007.

Mandat diperbarui setiap tahun, dan mengadopsi Resolusi Dewan Keamanan nomor 2173 pada 26 Agustus 2014, mandate diperpanjang lagi selama 10 bulan, sampai 30 Juni 2015.

Mandat UNAMID:

* Perlindungan warga sipil
* Berkontribusi pada keamanan untuk bantuan kemanusiaan
* Pemantauan dan verifikasi pelaksanaan perjanjian
* Membantu proses politik inklusif
* Berkontribusi untuk promosi hak asasi manusia dan supremasi hukum

Markas UNAMID berada di El Fasher, Darfur Utara. UNAMID memiliki beberapa kantor cabang pusat di sektor El Geneina (Darfur Barat), Nyala (Darfur Selatan), Zalingei (Darfur tengah) dan El DaeIn (Darfur Timur). UNAMID memiliki 35 lokasi penyebaran di seluruh lima bagian negara Darfur.

Pada tanggal 31 Juli 2007, UNAMID memiliki kekuatan 25.987 pasukan penjaga perdamaian berseragam. Ini termasuk 19.555 tentara, 360 pengamat militer dan petugas penghubung, 3772 penasihat polisi dan 2.660 *Form Police Unit* (FPU). Pada pertengahan 2011, UNAMID mencapai 90% dari kekuatan penuh resmi nya, membuatnya menjadi salah satu operasi penjaga perdamaian PBB terbesar.

Dengan resolusi 2063 31 Juli 2012, Dewan Keamanan memutuskan untuk menurunkan kekuatan komponen militer dan polisi. UNAMID kini memiliki kekuatan resmi 23.743 personel. Ini termasuk 19.248 pasukan penjaga perdamaian berseragam (15.845 tentara, 1.583 polisi dan 1.820 penasihat FPU) dan komponen sipil hingga 4495 pasukan penjaga perdamaian (1.185 staf internasional, 340 relawan PBB, dan 2.970 personel nasional).

UNAMID dihadapkan dengan berbagai kendala logistik dan keamanan karena harus beroperasi di medan yang berat dan dalam lingkungan politik yang kompleks dan sering bermusuhan. UNAMID juga menghadapi kekurangan dalam transportasi, peralatan, infrastruktur dan penerbangan aset kritis.

Sementara itu, UNAMID melaksanakan mandat dalam kekuatan dan dengan sumber daya yang terbatas untuk memberikan perlindungan kepada warga sipil di Darfur, memfasilitasi operasi bantuan kemanusiaan, dan membantu menyediakan lingkungan di mana perdamaian dapat dibentuk. UNAMID melakukan lebih dari 100 patroli setiap hari. UNAMID juga bekerja untuk mengatasi beberapa akar kritis konflik.

1. **AMISOM sebagai instrumen dari Visi dan Misi UA**

Pergantian nama OAU menjadi Uni Afrika tentu saja membawa beberapa perubahan yang mendasar dalam organisasi tersebut. Salah satunya adalah komitmen organisasi Uni Afrika untuk lebih terlibat aktif dalam situasi yang terjadi dalam kawasan Afrika. Terutama yang menyangkut tentang ancaman terhadap kedamaian dan stabilitas kawasan. Konflik-konflik yang terjadi di Afrika, menjadi perhatian organisasi. Sebelumnya pun OAU telah terlibat dalam berbagai usaha perdamaian di berbagai konflik yang terjadi di kawasan, namun dirasa masih kurang maksimal. Maka dari itu, komitmen tersebut di lembagakan dalam bentuk Undang-undang Konstitusi Uni Afrika dan Protokol Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika.

Sejalan dengan Visi dan Misi Uni Afrika untuk membentuk kawasan Afrika yang damai dan makmur, dibentuklah sebuah misi perdamaian untuk membantu menangani konflik di salah satu negara anggota Uni Afrika, Somalia, yang diberi nama AMISOM (*An African Union Mission in Somalia*) atau Misi Uni Afrika di Somalia.

Misi Uni Afrika di Somalia (AMISOM) adalah misi penjaga perdamaian regional yang dioperasikan oleh Uni Afrika dengan persetujuan PBB. Misi tersebut diciptakan oleh Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika pada 19 Januari 2007 dengan mandat selama enam bulan pertama.

AMISOM dibentuk dan menggantikan *Inter-Governmental Authority on Development* (IGAD) *Peace Support Mission to Somalia* (IGASOM), yang diusulkan IGAD dan misi pelatihan di Somalia disetujui oleh Uni Afrika pada bulan September 2006. IGASOM juga disetujui oleh Dewan Keamanan PBB.

Awalnya IGASOM diusulkan untuk segera dilaksanak pada Maret 2005 untuk menyediakan pasukan penjaga perdamaian untuk tahap terbaru dari Perang Saudara Somalia. Pada saat itu, *Islamic Courts Union* (ICU) belum menguasai Mogadishu, dan sebagian besar harapan persatuan nasional tersandar pada *Transitional Federal Government* (TFG). Pada bulan Mei tahun 2006, situasinya sangat berbeda, seperti ICU baru-baru terlibat Aliansi untuk *Restoration of Peace and Counter Terrorism* atau ARPCT dan berjuang untuk menguasai Mogadishu dalam Pertempuran Kedua Mogadishu. Pada bulan Juni, mereka telah menguasai ibu kota.

Rencana IGASOM dilanjutkan, meskipun pada bulan Juli ada indikasi oposisi dari ICU, yang melihat inisiatif sebagai dukungan AS, untuk bermaksud mengekang pertumbuhan gerakan Islam. Hingga Desember 2006, Dewan Keamanan PBB telah memberlakukan embargo senjata pada kelompok tersebut, tetapi embargo sebagian diangkat dan mandat untuk IGASOM dikeluarkan pada bulan Desember 2006.

Pada tanggal 20 Februari 2007, Dewan Keamanan PBB meresmikan Uni Afrika untuk menyebarkan misi penjaga perdamaian dengan mandat selama enam bulan, mengadopsi resolusi 1744 (2007) 13. Tujuan dari misi penjaga perdamaian adalah untuk mendukung kongres rekonsiliasi nasional dan meminta laporan dalam waktu 60 hari pada Misi Penjaga Perdamaian PBB.

Dewan Keamanan telah memberikan lampu hijau untuk Uni Afrika untuk mendirikan misi di Somalia selama enam bulan, dan meminta Sekretaris Jenderal untuk mengirim misi Penilaian teknis untuk melihat kemungkinan operasi penjaga perdamaian PBB berikut setelah penyebaran Uni Afrika. Selanjutnya dewan resmi misi Uni Afrika untuk mengambil langkah-langkah, sesuai, untuk melaksanakan dukungan untuk dialog dan rekonsiliasi dengan membantu pergerakan bebas, perjalanan yang aman dan perlindungan dari semua pihak yang terlibat dalam kongres rekonsiliasi nasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk para pemimpin politik , pemimpin klan, tokoh agama dan perwakilan masyarakat sipil.[[18]](#footnote-18)

AMISOM, sebagai Operasi Dukungan Perdamaian multidimensi, diberi mandat untuk:

* Mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai, dan berkoordinasi dengan dan Lembaga Pertahanan Nasional dan Keselamatan Umum Somalia, untuk mengurangi ancaman yang ditimbulkan oleh Al Shabaab dan kelompok-kelompok oposisi bersenjata lainnya,
* Membantu dalam mengkonsolidasikan dan memperluas kendali FGS atas wilayah nasionalnya,
* Membantu FGS dalam membangun kondisi untuk pemerintahan yang efektif dan sah di Somalia, melalui dukungan, sebagaimana mestinya, di bidang keamanan, termasuk perlindungan lembaga Somalia dan infrastruktur utama, pemerintahan, penegakan hukum dan pelayanan dasar,
* Menyediakan, sesuai kemampuannya dan sesuai, teknis dan dukungan lainnya untuk peningkatan kapasitas lembaga Somalia Negara, khususnya Pertahanan Nasional, Keselamatan Publik dan Lembaga Pelayanan Publik,
* Mendukung FGS dalam membangun institusi-institusi yang diperlukan dan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pemilu yang bebas, adil dan transparan pada tahun 2016, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Sementara,
* Berhubungan dengan aktor kemanusiaan dan memfasilitasi, yang mungkin diperlukan dan sesuai kemampuannya, bantuan kemanusiaan di Somalia, serta pemukiman kembali pengungsi dan kembalinya pengungsi,
* Memfasilitasi dukungan terkoordinasi oleh lembaga AU yang relevan dan struktur terhadap stabilisasi dan rekonstruksi Somalia, dan
* Memberikan perlindungan kepada personil Uni Afrika dan PBB, instalasi dan peralatan, termasuk hak untuk membela diri;[[19]](#footnote-19)

Staf AMISOM berasal dari berbagai negara di benua Afrika. Markas Besar Angkatan militer, misalnya, dikelola oleh petugas dari Burundi, Kamerun, Djibouti, Ethiopia, Gambia, Ghana, Kenya, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Uganda dan Zambia. Sebagian besar pasukannya berasal dari enam negara: Uganda, Burundi, Djibouti, Kenya, Ethiopia dan Sierra Leone.

AMISOM dipimpin oleh Wakil Khusus Ketua Komisi Uni Afrika untuk Somalia (SRCC) Duta Mahamat Saleh Annadif. Misi ini memiliki tiga komponen: Militer, Polisi dan Sipil. Semua komponen bekerja sama untuk mencapai mandat Misi.

Komponen Militer saat ini dipimpin oleh Komandan Pasukan Letnan Jenderal Silas Ntigurirwa dari Burundi dan dua wakilnya Mayor Jenderal Francis Kimeu Nthenge dan Mayor Jenderal Geofrey Baraba Muheesi dari Kenya dan Uganda Masing-masing. Komponen Polisi dipimpin oleh Pelaksana tugas AMISOM Komisaris Polisi Mr Benson Oyo-Nyeko. Komponen Sipil diawasi oleh SRCC yang mengawasi Politik, Sipil, Kemanusiaan, Gender dan Departemen Informasi Publik. Duta Besar Epiphanie Kabushemeye-Ntamwana adalah Kepala Staf sipil. Chief Administrative Officer Timothy Kiguti mengepalai komponen dukungan dari misi yang meliputi personel administrasi, keuangan dan penganggaran, pengadaan logistik dan antara isu-isu lainnya.

Kekuatan personil berseragam AMISOM sekarang berjumlah 22.126. Ini termasuk tentara dan polisi. Seiring dengan staf Markas Angkatan 81, komponen militer memiliki 5.432 tentara dari Burundi, 1000 pasukan dari Djibouti, 3664 dari Kenya, 850 Sierra Leone, Ethiopia 4395 dan 6223 tentara dari Uganda. Komponen polisi terdiri dalam tiga kategori yang meliputi *Professionals Senior Leadership* (SLTF*) Form Police Unit* (FPU) dan *Individual Police Officer* (IPO). IPO berasal dari Burundi, Gambia, Ghana, Kenya, Nigeria, Sierra Leone, Uganda dan Zimbabwe sementara FPU itu dari Nigeria dan Uganda masing-masing terdiri dari 140 petugas. IPO ditempatkan di semua sektor AMISOM.

Dana AMISOM diperoleh dari paket dukungan logistik PBB, sumbangan bilateral, dan sumbangan sukarela untuk PBB dikelola *Trust Fund in Support* *of* AMISOM. Uni Eropa (UE) menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk pembayaran tunjangan pasukan dan biaya terkait lainnya, dalam rangka *African Peace Facility* (APF).

1. Yulianingsih, Wiwin dan Sholihin, Moch. Firdaus. 2014. *Hukum Organisasi Internasional*. Yogyakarta: Penerbit ANDI [↑](#footnote-ref-1)
2. Kemunculan Regionalisme di Afrika, melalui http://ibdbayuerfiyanto.blogspot.com/2010/11/uni-afrika.html, diakeses pada 9 Februari 2015 [↑](#footnote-ref-2)
3. Yulianingsih, Wiwin dan Sholihin, Moch. Firdaus, *Op.Cit.,* hlm.238 [↑](#footnote-ref-3)
4. Permanent Mission of France to the United Nations in New York. *Role of regional organizations in peacekeeping and security* dalam <http://www.franceonu.org/france-at-the-united-nations/thematic-files/peace-and-security/role-of-regional-organisations-in/france-at-the-united-nations/thematic-files/peace-and-security/role-of-regional-organisations-in/article/role-of-regional-organizations-in> diakses pada 9 Februari 2015 [↑](#footnote-ref-4)
5. Dan peran organisasi regional ini ditekankan kembali dalam laporan Sekjen PBB, Boutros Ghali pada 1992 yang berjudul “An Agenda for Peace”-Anwar, D.F. 2011. *Peran Indonesia akan Memperkuat Kerjasama ASEAN-PBB* dalam <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/137-mei-2011/1108-peran-indonesia-akan-memperkuat-kerjasama-asean-pbb.html> diakses pada 9 Februari 2015 [↑](#footnote-ref-5)
6. Bergenas, Johan. *The role of regional and sub-regional organizations in implementing UN Security Council Resolution 1540: a preliminary assessment of the African continent* dalam <http://www.unidir.org/pdf/ouvrages/pdf-1-978-92-9045-190-7-en.pdf> diakses pada tanggal 9 Februari 2015 [↑](#footnote-ref-6)
7. Organization of African Unity (OAU). *International Encyclopedia of the Social Sciences. 2008* melalui <http://www.encyclopedia.com/topic/Organization_of_African_Unity.aspx> diakses pada 9 Februari 2015 [↑](#footnote-ref-7)
8. African Union. *African Union Handbook 2015.* Halaman 10 [↑](#footnote-ref-8)
9. Transformasi Organisasi Uni Afrika, dalam OPINI 24 Desember 2010, melalui <http://luar-negeri.kompasiana.com/2010/12/25/transformasi-organisasi-uni-afrika-327549.html> diakses pada 5 Desember 2014 [↑](#footnote-ref-9)
10. *Op.Cit* halaman 15 [↑](#footnote-ref-10)
11. [www.au.int](http://www.au.int). *Symbol of African Union.* Diakses pada 9 Februari 2015 [↑](#footnote-ref-11)
12. CONSTITUTIVE ACT OF THE AFRICAN UNION (Piagam Uni Afrika) [↑](#footnote-ref-12)
13. *ibid* [↑](#footnote-ref-13)
14. Peace and Security Council (PSC). *African Union Handbook 2015*. Halaman 46 [↑](#footnote-ref-14)
15. Sam G. Amoo: *Frustrations of Regional Peacekeeping: The OAU in Chad, 1977-1982.* The Carter Centre [↑](#footnote-ref-15)
16. Ihsan, “Peran Uni Afrika Dalam Resolusi Konflik Darfur” Skripsi FISIP-HI Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014, hlm. 39 [↑](#footnote-ref-16)
17. *ibid* [↑](#footnote-ref-17)
18. Latar Belakang AMISOM melalui http://amisom-au.org/amisom-background/ diakses pada 22 Desember 2014 [↑](#footnote-ref-18)
19. Mandat AMISOM melalui http://amisom-au.org/amisom-mandate/ diakses pada 22 Desember 2014 [↑](#footnote-ref-19)